

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan tekanan globalisasi, meningkatnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh setiap negara diberbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan maupun politik, telah membuat saling ketergantungan antar negara di dunia juga semakin meningkat. Globalisasi telah menciptakan ruang di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam ekonomi politik global.¹

Di era globalisasi yang dimana tidak hanya negara dengan negara yang melakukan hubungan internasional akan tetapi ada juga aktor Non negara yang dapat melakukan hubungan kerjasama internasional, seperti Kota yang ada didalam negara. Hal ini di karenakan aktor kerjasama internasional tidak mungkin lagi di dominasi oleh pemerintah pusat.

Kerjasama *Sister City* juga sekaligus menunjukkan kenyataan bahwa pengaruh efek globalisasi telah melahirkan perkembangan yang sangat pesat, hampir terjadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam melahirkan beragam bentuk kerjasama didunia. Khususnya dipengaruhi oleh kecendrungan kesadaran bahwa setiap Negara bangsa didunia tidak selamanya dapat mengandalkan potensi dalam negerinya untuk memenuhi kebutuhannya, ini

¹ Wanarno Budi." Isu-Isu Global Kontemporer hal 127

dapat dipenuhi oleh Negara melalui sebuah kerjasama. Seiring perkembangan kerjasama tersebut, lahir pula aktor-aktor baru seperti Pemerintah Daerah sebagai penggerak dalam kerjasama internasional. Jika selama ini kerjasama awalnya hanya dilakukan antar pemerintah pusat dalam Negara, maka saat ini, Pemerintah Daerah pun dapat secara aktif turut serta dalam kerjasama luar negeri, hal tersebutlah yang mendasari terbentuknya hubungan kemitraan antar kota (*Sister City*).²

Sister City adalah bentuk kerja sama yang disepakati secara resmi antara dua masyarakat di dua Negara yang berbasis luas. *Sister city* yaitu: kerjasama strategis jangka panjang antara masyarakat di berbagai kota, dimana kota mereka menjadi pemeran utama. Secara resmi artinya hubungan *Sister City* harus disetujui otoritas lokal yang mendukung kegiatan masyarakat³. *Sister city* merupakan salah satu kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah kota atau provinsi. Persamaan antara kedua kota atau provinsi merupakan dasar dari kerjasama. Hubungan kerjasama *sister city* semakin terfokus dan terjalin dengan baik ketika dilkeuarkannya UU No. 22 tahun 2002 tentang pemerintah daerah yang kemudian di revisi menjadi UU No. 32 tahun 2004. UU tersebut memberikan jarak dan kewenangan yang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi dan sumber daya dalam hubungan kerjasama internasional.⁴

²Hendri Renola Fitri & Faisyal Rani, 'Jurnal Transnasional', Implementasi kerjasama *sister city* Bandung – Braunschweig, Juli 2013

³O'Toole, K. (2001). *Kokusaika and Internationalisation: Australian and Japanese Sister city Type Relationships*. *Australian Journal of International Affairs*, 55(3), 403-419.

⁴Supriyanto dan Sandi A.T.T., Pengembangan potensi provinsi daerah istimewa Yogyakarta melalui Kejasama Sistem Province (yogyakarta:2002 dalam mimbar hukum 41 halaman 127-130

Kerjasama Sister City di Indonesia sudah mulai muncul pada tahun 1960-an. Dengan berbagai motivasi di dalam awal munculnya kegiatan kerjasama tersebut, namun yang utama adalah karena banyak didorong oleh kesamaan, misalnya sama-sama ibukota negara, contohnya Jakarta banyak melakukan kerjasama dengan berbagai ibukota negara dikarenakan sama-sama ibukota negara. Pada tahun 1980-an kerjasama internasional dalam bentuk Sister City semakin marak. Pada saat ini lebih kurang 100 kerjasama internasional yang berbentuk *Sisterhood* telah tercatat di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Dari catatan yang ada, tidak sampai 15% dari kerjasama tersebut yang berjalan dengan baik, dan tidak sampai 20% berjalan dengan seadanya⁵.

Hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri. Sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963, di luar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan tersendiri.⁶ Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Luar Negeri dalam beberapa bentuk berikut :

1. Kerjasama provinsi dan kabupaten / kota “kembar”,
2. Kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan,
3. Kerjasama penyertaan modal, dan

⁵43 Usmar Salam, “Dinamika Kerjasama Internasional Provinsi di Indonesia dengan Luar Negeri”, dalam Makalah Lokakarya Cara penanganan Kerjasama Internasional. 2004. hlm 7. 41

⁶ Djumadi, dkk, Kajian Negara Eropa Potensial untuk Bekerjasama dengan Provinsi DIY (Yogyakarta : BIGRAF,2008), hal. 14

4. Kerjasama lain sesuai dengan peraturan perundang -an⁷

Indonesia merupakan negara yang menganut negara kesatuan yang berbentuk republik yang dimana pemerintahan indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota telah mempunyai pemerintahan untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah kota dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan baik dan dapat menjalin kerjasama internasional berdasarkan asas otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah usaha memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik di wilayahnya. Otonomi daerah pada dasarnya sebagai gambaran dari *power sharing* yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dengan adanya sistem otonomi daerah ini maka kran kerjasama internasional antara daerah dan internasional pun semakin terbuka lebar. Kerjasama luar negeri oleh pemerintah otonom, jika dilihat sudut pandang studi. Hubungan Internasional, secara teoritis, merupakan hubungan yang tidak lagi bersifat *state-centric* dimana aktor non pemerintah dapat secara leluasa mem *bypass* hubungan tanpa melibatkan pemerintahan pusat.⁸

Salah satu kebutuhan pengoptimalisasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi asing dengan segala bentuk kerjasama. Pembangunan

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Bab III Pasal 3

⁸Takdir Ali Mukti, "Paradiplomacy", Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia," hal 4

investasi tidak mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tentunya pemerintah daerah harus bisa menjadi fasilitator dan sebagai aktor dalam kerjasama luar negeri agar mendorong dan mengendalikan tumbuh kembangnya investasi ini dapat berdampak positif terhadap pembangunan di kota Makassar serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, faktor optimalisasi daerah erat kaitannya dengan otonomi suatu daerah.

Mengenai otonomi daerah, Makassar merupakan salah satu kota di Indonesia yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk menerapkan sistem otonomi daerah, Makassar merupakan kota terbesar di kawasan Indonesia Timur dan wilayah metropolitan terbesar kedua di luar Pulau Jawa dan dijadikan sebagai ibu kota Sulawesi Selatan. Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, kota Makassar tergolong salah satu kota terbesar dan metropolitan di Indonesia dan dengan wilayah seluas 199,26 km² dan penduduk hampir mencapai 1,4 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima dalam hal jumlah penduduk setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan⁹ Kota Makassar juga merupakan kota yang mempunyai multi etnik yang terdapat berbagai suku seperti Bugis, Makassar, Toraja, Tingkok, dan juga Jawa.

Dari penerapan sistem otonomi daerah di atas tentunya kota Makassar tertarik untuk menjalin kerjasama internasional dengan pemerintah daerah yang ada di luar negeri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh kota Makassar. Dalam upaya membangun investasi yang optimal, pemerintah kota Makassar menempuh berbagai cara secara komprehensif dan optimalisasi peran

⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar#cite_note-1 di akses pada juli 2015

dan fungsi kelembagaan dalam bidang investasi maupun meningkatkan sarana prasarana dalam memberikan pelayanan kepada pihak asing agar mempunyai ketertarikan menanamkan modalnya di kota Makassar, khususnya para penanaman modal asing dari Tokyo.

Kerjasama luar negeri yang akan dilakukan oleh kota Makassar dengan kota Tokyo meliputi bidang anatar lain: kesehatan dan pendidikan seperti pengiriman tenaga kerja lokal dan guru untuk menimba pengalaman di negeri sakura.¹⁰ Cakupan kerjasama ini akan lebih baik ketika kota Makassar dengan kota Tokyo menjalin kerjasama lebih yang mencakup bidang pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana. Tokyo merupakan kota metropolitan yang yang dilihat dari pembagunan infrastruktur dan pembagunan sumberdaya manusianya (SDM) sangat baik dan terus berkembang.

Menurut Shingo Higashimoto selaku Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar bahwa sejak tahun 1880-an orang Jepang telah mulai datang ke Makassar untuk menjadi pedagang, untuk itu keberadaan komunitas orang Jepang di Makassar cukup memiliki sejarah panjang. Sebagai salah satu kantor perwakilan pemerintah luar negeri yang ada di pulau Sulawesi (selain Konsulat Jenderal Filipina di Manado) dan satu-satunya yang ada di Kota Makassar.¹¹

Tokyo sangat berperan aktif dalam pengembangan potensi di kota Makassar yang dulunya belum bisa dimanfaatkan, namun adanya kerjasama Luar

¹⁰ <http://www.antarsulsel.com/berita/56940/makassar-akan-kirim-perawat-ke-jepang>. Di akses pada tgl 26 november 2015

¹¹ http://www.id.emb-japan.go.jp/about_mks.htmldi akses pada hari Rabu tgl 25 November 2015

negeri yang dibangun oleh kedua kota tersebut, sehingga banyak potensi yang dimiliki oleh kota Makassar yang sangat menjanjikan untuk dunia usaha dan investasi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan dan data-data yang sudah dipaparkan, penulis berusaha untuk menarik sebuah rumusan masalah yaitu : Bagaimana peluang dan proses pembentukan kerjasama kota Makassar dengan kota Tokyo ?

C. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan sebuah penelitian yang membahas mengenai kerjasama internasional yang bersifat ilmiah maka diperlukan seperangkat teori ataupun konsep untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada didalam tulisan ini dan juga bertujuan agar penulis dan pembaca mampu memahami apa maksud dari karya ilmiah ini.

1. Paradiplomasi

Paradiplomasi merupakan suatu konsep yang dapat menjelaskan hubungan antara *sub-national government* (pemerintah sub-national) dengan negara ataupun *sub-national government* negara lainnya, yang dapat melakukan interaksi yang melewati pemerintah pusat sebagai salah satu pemegang peran tertinggi dalam suatu negara.

Paradiplomasi merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas melakukan

hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas ‘*sub-state*’,¹². Istilah ‘*paradiplomacy*’ pertamakali diluncurkan oleh Basque, Panayotis Soldatos pada tahun 1980-an sebagai gabungan istilah ‘*parallel diplomacy*’ menjadi ‘*paradiplomacy*’ yang mengacu pada Makna ‘*the foreign policy of non-central governments*’, Menurut Aldecoa Keating dan Boyer istilah lain yang pernah di lontarkan oleh Ivo Duchacek (New York, thn 1990) untuk konsep ini ‘*micro-diplomacy*’,¹³

Dalam konteks ini, aktor sub-Negara diperankan oleh pemerintah regional atau lokal yang secara tradisional bertindak sebagai aktor dalam negeri. Namun pada era transnasional pemerintah regional juga melakukan interaksi yang melintasi batas-batas negara mereka, dan dalam taraf tertentu, mereka juga menyusun kebijakan kerjasama luar negerinya, yang dalam banyak kasus tidak selalu berkonsultasi secara baik dengan pemerintah pusat. fenomena pemerintah regional membangun hubungan internasional sangat tampak di negar-negara industri maju di Barat, seperti di Flander-Belgia, Catalonia Spanyol, the Basque Country, Quebec-Canada.¹⁴

Hukum peradiplomasi berdasarkan kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya berkaitan dengan kerjasama internasional. Kerangka pertama dalam hukum Undang Undang nomor 317 tahun 1999 pasal 1 bahwa

¹²Wolff, stefan, ‘Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges’, Hal 1-2 dan 13, University of Nottingham, 2009 di kutib dalam buku Takdir Ali Mukti Op, Cit hal 37

¹³Criekmans, David, ‘Are The Boundaries Between Paradiplomacy and diplomacy watering Down ibid Hal 38.

¹⁴Lecours, andre, ‘ Political issues of Paradiplomacy: Lessons From the Developed World ‘, hal. 1, Netherlands instirute of internasional Relations’ Clingendel’, Desember 2008’,. Dikutib dalam buku Takdir Ali Mukti Op, Cit hal 38

kegiatan hubungan luar negeri di lakukan oleh pemerintah tingkat pusat dan juga tingkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama luar negeri secara bebas tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat.

Makassar merupakan salah satu kota yang telah mengimplementasikan paradiplomasi untuk membentuk smart city dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik yang dicirikan oleh integritas, akuntabilitas, dan transparan. Program smart city di Makassar merupakan program strategis yang mendapat pujian dari sejumlah pihak seperti gubernur hingga menteri, bahkan Konsulat Amerika Serikat memberikan apresiasi terhadap program tersebut. Oleh karena itu, disebabkan oleh kemajuan dalam bidang teknologi informasi setiap kota dan kabupaten serta propinsi seharusnya menciptakan kota pintar berbasis teknologi informasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien dan inovatif¹⁵

Kerjasama luar negeri pemerintah kota Makassar dengan Tokyo merupakan stimulus memperluas pergaulan internasional dan juga memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap masyarakat kota Makassar karena kerjasama ini dapat dijadikan sebagai contoh untuk meningkatkan kesejahteraan di dalam daerah karena adanya interaksi antara kedua kota yang mempunyai tujuan yang sama.

Pola politik internasional yang ada di Indonesia di atur dalam otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang, dan kewajiban

¹⁵ Muhamad Fathun;, Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar;, skripsi UMY

terhadap satu daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya, serta kepentingan masyarakat sendiri sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi, secara etimologi, berasal dari penggalan dua kata yaitu; *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang, sedangkan secara terminologi ialah membuat perundang-undangan untuk dirinya sendiri (*Zelfwetgeving*).¹⁶ Namundalam perkembangannya, konsep otonomi daerah juga mengandung arti *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Hal ini seturut dengan pendapat C.W. van der Pot, yang memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding*(menjalankan rumah tangga sendiri).¹⁷

Dalam hal ini kota Makassar mempunyai otonomi daerah dapat menentukan kebijakan dengan mandiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Dilihat dari kerjasama yang di lakukan oleh kota Makassar dengan Tokyo. Hal ini di perkuat dengan adanya UU No 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan otonomi dan tugas pembantu¹⁸ .

Berkaitan dengan teori di atas, bahwa kota Makassar kini dapat menjalankan kerjasama dengan pemerintah kota Tokyo dengan bebas setelah perbatasan hilang karena berbagai kesepakatan regionalisasi, kota-kota antar negara khususnya kota Makassar akan makin cepat terkoneksi, saling bekerja

¹⁶M. Laica Marzuki. OP,Cit hal. 161

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Takdir Ali Muktim;, Op, Cit', hal 79

sama untuk membangun kota Makassar dengan kota Tokyo. Kerjasama ini akan jadi pintu terbuka antarkota untuk kian erat bekerja sama untuk kepentingan dan kebutuhan didalam kota itu sendiri.

2. Teori Transnasional

Konstelasi hubungan antara negara dalam percaturan internasional di era saat ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dari pandangan isu ‘‘*State Centeris*’’ yang telah memusatkan pada masalah kekuasaan dan keamanan ke isu-isu ekonomi yang lebih menguntungkan. Kini peran negara tidak lagi didominasi dalam kanca internasional karena adanya aktor lain yang terlibat seperti Non Negara yang kini semakin eksis terlibat langsung dalam pergaulan internasional. Pandangan ini didasarkan pada pengamatan semakin meningkatnya kepekaan dan kerentanan negara-negara dan aktor-aktor Non negara terhadap interdependensi ekonomi.¹⁹

Menurut Richard Falk mendefinisikan, ‘‘hubungan transnasional adalah perpindahan barang, informasi, dan gagasan melintasi batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan secara langsung oleh aktor-aktor pemerintah.’’²⁰ Transnasional juga dapat diartikan sebagai jalur jamak dan kontak antara masyarakat yang merupakan kondisi dan terjadinya ketergantungan yang kompleks.

Menurut Mochtar Mas’oed, aktor non negara dalam hubungan bisa berwujud kelompok -kelompok suku, etnis atau separatis di dalam negara,

¹⁹ Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990. Hal 232

²⁰ Richard Falk, *A Study Of Future World*, dalam bukunya Mohtar Maso’ed, *Ibid*, hlm. 231.

berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan-perusahaan multinasional bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah.²¹

Dari definisi diatas sehingga dapat dikemukakan bahwa hubungan transnasional adalah bentuk pola internasional yang didalamnya tidak didominasi oleh aktor negara melainkan telah digeser oleh aktor non negara seperti pemerintah daerah yang tidak lagi terbatas oleh Wilayah suatu negara.

Dalam hal ini kota Makassar akan berpeluang menjalin kerjasama internasional dengan kota Tokyo dalam berbagai bidang seperti, pendidikan, kesehatan, infastruktur. Dalam bidang kesehatan dan pendidikan pemerintah kota Makassar menginginkan perawat lokal yang ada di Makassar dapat meninambah pengalam di Negeri sakura hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Walikota Makasar disalah satu media sosial. Pertukaran informasi sangat dibutuhkan oleh pemerintah kota Makassar untuk mendukung terwujudnya visi dan misi kota Makassar .

Peluang kota Makassar untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah kota Tokyo sangat besar, hal ini dilihat dengan sejalannya program pemerintah menuju kota dunia. Untuk menuju kota dunia, kota Makassar harus menjalin kerjasama luar negeri dengan pemerintah kota yang ada diluar negeri. Kota Tokyo dianggap mampu untuk mewujudkan visi dan misi kota Makassar karena kota Tokyo lebih maju dalam pengembangan kota, sehingga ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kota Makassar menjalin kerjasama dengan kota Tokyo dengan cara bertukar informasi mengenai pengembangan kota dalam berbagai bidang.

²¹ Mochtar Mas'oe'd, *Op,Cit*, hlm. 231.

Dalam kerjasama luar negeri yang akan dilakukan oleh kedua kota ini diharapkan mampu memberikan sumbasi yang sangat besar terhadap kedua kota khususnya kota Makassar karena dengan terjalinnya kerjasama internasional antara kedua kota nantinya akan memberikan dampak yang sangat positif dalam berbagai bidang karena adanya perukaran informasi yang dilakukan oleh kedua kota.

Seiring dengan tekanan globalisasi, Perkembangan teknologi sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan kota Makassar lebih maju, oleh sebab itu kota Makassar harus mempunyai parner untuk mengembangkan teknologi. Kota Tokyo dianggap sebagai kota yang sangat pesat kemajuan terhadap perkembangan teknologi karena kota Tokyo merupakan kota yang sudah maju dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastktur sarana dan prasarana sehingga hal ini yang memicu kota Makassar berpeluang untuk menjalin kerjasama internasional dengan kota Tokyo.

Dalam kasus diatas sehingga dapat kita gambarkan bahwa kerjasama luar negeri tidak lagi didominasi oleh pemerintah pusat akan tetapi pemerintah kota juga dapat berperan untuk menjadi aktor dalam kerjasama luar negeri.

D. Hipotesa

Berdasarkan aplikasi pada kerangka konseptual dan rumusan masalah. Bagaimana peluang dan proses pembentukan kerjasama kota Makassar dengan kota Tokyo. Kota Makassar berpeluang menjalin kerjasama karena dilihat oleh potensi yang dimiliki oleh kota Makassar sangat baik akan tetapi masih mempunyai beberapa kelemahan dalam pengembangan sehingga ini menunjukkan

bahwa kota Makassar membutuhkan kerjasama luar negeri dengan kota Tokyo yang dianggap mampu untuk mengembangkan kota Makassar. Sehingga ini berpotensi menjalin kerjasama dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Teknologi, Budaya, dan Pariwisata. Bentuk kerjasama berupa Kerjasama Sister City dan bantuan internasional dalam hal pertukaran informasi.

E. Tujuan Penelitian

Dengan melihat Rumusan Masalah diatas dan juga hipotesa, penulis memiliki beberapa tujuan dalam penelitian yaitu :

1. Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuh dalam bidang akademik, maupun dalam bidang pegetahuan adalah salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) pada jurusan ilmu hubungan internasional di fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memperkuat dan memperdalam pengentahuan mengenai kerjasama internasional yang dilakukan oleh aktor Non negara atau Sister City.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi yang dihadapi oleh pemerintah kota Makassar untuk menyelesaikan problematika dan pergaulan internasional agar pemerintah kota Makassar lebih memperluas pergaulan internasional dan mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dalam melakukan kerjasama internasional atau Sister City.
3. Diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kerjasama yang dilakukan oleh kota Makassar dengan kota Tok

4. Menerapkan 2 teori kedalam Hubungan Kerjasama internasional dalam kasus pemerintah Makassar dengan Tokyo

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak terlalu jauh dan luas dalam pembahasan ini maka penulis memberikan waktu. Jangkuan penelitian dalam penulisan ini, penulis menekankan penggunaan batasan waktu peristiwa yang terjadi pada tahun 2014 sampai 2019. Kemudian manfaat dan keuntungan apa saja yang bisa didapatkan pemerintah Kota Makassar dalam pergaulan internasional. akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga akan menggunakan data data luar rentan waktu tersebut sepanjang masih relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.

G. Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

G.1 Data yang dibutuhkan

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah, Bagaimana peluang dan proses pembentukan kerjasama kota Makassar dengan kota Tokyo ? Dengan demikian data dibutuhkan bahan nalisa terutama yaitu :

1. Data potensi kota Makassar dengan kota Tokyo
2. Manfaat dari kerjasama tersebut
3. Peluang kerjasama

G.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti yang tersebut di atas, maka dilakukan dengan cara pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi, Pengabdian, dan menjelaskan data data sekaligus mempelajari dokumen-dokumen yang disebutkan dalam kerjasama internasional.
2. Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada responden. Dalam hal ini adalah kepada sub bagian kerjasama dan pemerintah dan lembaga luar negeri dari badan kerjasama internasional dan wawancara dengan bapak Walikota Moh Ramdan Purmanto selaku Walikota Makassar dan pihak lain yang berkepentingan dengan objek penelitian.

G.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Penelitian lapangan (*field Research*) penelitian lapangan ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi dan data-data secara lengkap yang berkaitan dengan studi kasus dalam skripsi ini.
2. Penelitian perpustakaan (*Lebrary Research*) peneilitin perpustakaan adalah penelitian dengan cara membaca, memperjelas berbagai literatur yang relevan untuk mendapatkan landasan teori yang akan diterapkan dalam masalah penelitian agar dapat memecahkan permasalahan dan menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini.

G.4 Metode Penelitian

Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif artinya menggambarkan atau meuraikan hal dari pengamatan dan penelitian seperti (melihat kondisi kota makassar dan peristiwa), Sedangkan Kualitatif artinya Naratif atau paparan secara lahiriah dari susunan kata-kata dan kalimat yang di tuangkan dalam skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terjasi dari lima Bab, penggambaran keseluruhan dari tiap tiap adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulis, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, teknik pengumpulan data sistematika penulis

Bab II Potensi Kerjasama kota Makassar dan Kajian Wilayah kota Tokyo di Bab ini akan membahas secara seluruhan mengenai potensi yang dimilii oleh kota Makassar dan Tokyo

Bab III Analisis Peluang Kerjasama Kota Makassar Dengan Kota Tokyo, di Bab ini membahas secara detail mengenai peluang kota Makassar dalam menjalin kerjasama dengan kota Tokyo sekaligus menjawab rumusan masalah.

Bab IV Kesimpulan,Lampiran dan Daftar Pustaka, Berisi tentang data-data Buku, literatur, dan artikel yang digunakan selama penulisan dan dicantumkan dalam tulisan ini.